



Tunjangan Kinerja ASN Akan Naik

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Provinsi DIY menyambut baik rencana kenaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk aparatur sipil negara (ASN). Besaran untuk kenaikan tukin nantinya akan disesuaikan kemampuan daerah dan tidak melebihi postur APBD.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY, Bambang Wisnu Handoyo, menyambut gembira adanya kenaikan tunjangan kinerja ini. Selain dapat memantik semangat kinerja, hal tersebut juga untuk menyejahterakan ASN.

"Untuk kenaikan ini prinsipnya harus mulai disiapkan sebaik-baiknya. Orang harus melihat kinerja, dan dalam memberikan tunjangan tergantung juga kemampuan keuangan daerah," jelasnya kepada reporter *Tribun Jogja*, Selasa (15/1).

Beberapa hal yang dapat di-

lihat dalam memberikan tukin ini di antaranya adalah dengan mencermati postur APBD. Selama ini postur anggaran untuk belanja tidak langsung berkisar antara 40 persen dan belanja langsung 60 persen.

"Jangan sampai adanya kenaikan tukin malah membuat postur APBD jomplang. Yang paling penting kami cermati bagaimana kenaikan ini membawa kesejahteraan, namun juga tidak membuat belanja untuk kepentingan masyarakat jadi terpangkas," urainya.

Beberapa cara yang bisa ditempuh agar biaya atau belanja untuk gaji PNS dan juga biaya untuk aparatur negara tidak mengurangi biaya masyarakat adalah dengan evaluasi. Evaluasi ini, kata Bambang, lebih

● ke halaman 7

Tunjangan Kinerja ASN Akan

• Sambungan Hal 1

difokuskan pada persoalan anggaran.

"Misalnya ada evaluasi terhadap biaya operasional yang sudah duplikasi atau tidak efektif. Biaya perjalanan dinas, dan rapat-rapat bisa diefektifkan untuk tukin. Prinsipnya prioritas tetap pada masyarakat," paparnya.

Perlu diketahui, pemerintah berencana menyesuaikan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil alias PNS di setiap Kementerian maupun Lembaga tahun ini. Besaran kenaikan tunjangan kinerja itu bervariasi, mulai dari 70 persen hingga 90 persen, tergantung kinerja ASN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, menyampaikan, kenaikan tunjangan kinerja itu juga akan diterapkan di level pemerintah daerah.

"Untuk Kementerian-Lembaga tentu akan kita sesuaikan kemudian tukin (tunjangan kinerja) untuk pemerintah daerah juga," urainya.

Syafruddin, menjelaskan, saat ini pembahasan mengenai kebijakan kenaikan tunjangan itu telah usai, tinggal menunggu diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Ya

tinggal Menteri Keuangan, karena kita sudah selesai bahas itu," jelas dia.

Mantan Wakapolri itu, menegaskan, rata-rata tunjangan kinerja antar ASN sama. Ia pun menyebut tidak ada kementerian yang mendapat tunjangan kinerja di tahun ini yang besaran kenalkannya mencapai 300 persen.

"Nggak ada dong, tukin rata-rata sama, cuma paling beda (sedikit), sesuai kinerjanya saja. Rata-rata sekarang itu di 70 persen, 80 persen, 90 persen paling tinggi," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta, Kris Saronjo Sutejo, menyebutkan bahwa sampai kemarin, Selasa (15/1), belum ada perintah mengubah skema Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). "Belum ada surat sama sekali," ujarnya, Selasa (15/1).

Kris, menjelaskan, sejak Oktober 2018 skema pemberian TPP pada pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta telah berubah. Sebelumnya, yakni pada skema pertama TPP, presensi menduduki prosentase terbesar yakni 60 persen, disusul kinerja pegawai 20 persen, serta kinerja organisasi 20 persen.

Namun, lanjutnya, dalam Perwal yang baru yakni Perwal 48/2018 tentang TPP Berbasis Kinerja terjadi perubahan indikator pemberi-

an TPP. TPP dapat diberikan penuh apabila memenuhi 100 persen seluruh bobot indikator.

"Kalau saat ini, presensi hanya 40 persen dari 50 persen indikator statis. Sementara prosentase terbesar ada di indikator dinamis sebesar 50 persen yang merupakan aktivitas harian jabatan," ujarnya.

Selain prosentase untuk presensi yang berkurang, Kria juga mengungkapkan bahwa dalam skema terbaru khususnya untuk aktivitas harian jabatan, pegawai yang bersangkutan harus berperan aktif memilih dan mengajukan aktivitas tambahan dalam e-kinerja.

"Kalau sebelumnya di skema pertama, inputnya secara manual dari OPD. Saat ini semua pegawai wajib melaporkan apa yang dikerjakan tiap harinya, dari menit, jam, dan harian. Kurang dalam mengisi aktivitas harian, maka dipotong TPP-nya," bebernya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menambahkan, tidak ada perubahan anggaran untuk TPP 2019. Untuk diketahui, anggaran TPP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada 2018 lalu mencapai Rp181 miliar. "Anggaran TPP 2019 masih sama dengan 2018," tuturnya. (ais/kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005